

RENCANA KERJA

TAHUN 2021



**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
(DPMD)
KABUPATEN LUWU UTARA**

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen Perencanaan Tahunan yang didasarkan pada Dokumen Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016 - 2021 di jabarkan lebih lanjut melalui Renstra SKPD dan menjadi Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja setiap tahunnya yang memuat Program dan Kegiatan prioritas dan usulan – usulan dari para pemangku kepentingan

Tahun 2021 merupakan tahun terakhir Perencanaan Pembangunan Daerah dari RPJMD 2016-2021. Akan tetapi mengisi kekosongan acuan dalam menyusun Rencana Kerja SKPD maka RPJMD Kabupaten dan Renstra SKPD Tahun 2016-2021 tetap merupakan dokumen perencanaan yang sah untuk menjadi acuan, berdasarkan hal tersebut maka program dan kegiatan yang akan direncanakan pada rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 adalah Program dan Kegiatan yang belum mencapai target dan belum dilaksanakan.

Tahun 2021 ini adalah tahun kelima Periode Pelaksanaan Renstra tahun 2016- 2021 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2020 dimana capaian kinerja out come (program) dan out put (kegiatan) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2020 masing-masing sebesar% dan% dari yang semestinya 100% dengan kriteria tingkat capaian kinerja adalah TINGGI Sementara untuk capaian kinerja out come dan out put dari tahun 2016 s.d 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut masing-masing telah mencapai 79,54% dan 75,83% dari yang semestinya 80% untuk tahun kelima RPJMD dan Renstra DPMD dengan kriteria tingkat capaian kinerja 2016-2021 adalah TINGGI Dan dari capaian tersebut total 27 kegiatan yang ada , jumlah kegiatan yang terlaksana berdasarkan target antara lain Rendah 1 (satu) atau 6,25% , sesuai/tercapai 13 atau 81,25% yang melebihi target tidak ada sementara tidak ada lagi kegiatan yang di programkan dalam rencana kerja tidak dapat dilaksanakan .

Renja ini merupakan dokumen Perencanaan yang memuat tentang program dan kegiatan 1 (satu) tahun kedepan sebagai dasar untuk menyusun RKA, serta sebagai alat pengukuran kinerja pada akhir tahun.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47 Tambahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No.2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2020.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 8);
25. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun Anggaran 20120 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 63);

I. 3. Maksud dan Tujuan

I.1.1. Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

I.1.2. Tujuan :

- a. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat
- b. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020.
- c. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program-program dan kegiatan yang telah direncanakan.
- d. Untuk menggambarkan proyeksi pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- e. Merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan pada prinsip-prinsip good governance.

I. 4. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN,

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,
- 3.2. Tujuan dan Sasaran SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB. II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SKPD	CAPAIAN KINERJA OUT COME DAN OUT PUT		KRITERI CAPAIAN KINERJA		JUMLAH DAN PERSENTASE CAPAIAN KEGIATAN					KRITERIA KETEPATAN PERENCANAAN
	(100%) 2019 (%)	(80%) 2016-2021 (%)	2019	2016-2021	JUMLAH KEGIATAN	RENDAH (%)	SESUAI TARGET (%)	MELEBIHI TARGET (%)	TDK TERLAKSANA (%)	% YANG MEMENUHI TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
DPMD	69,97	109.39	Tinggi	Sangat Tinggi	27	0	27	0	0	
	99.74	95.05			0	4.17	99,74	0	0	Tinggi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tabel 2.1 Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Capaian kinerja out come (program) dan out put (kegiatan) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa khusus tahun 2019 masing-masing sebesar 69,97% dan 99,74% dari yang semestinya 100% dengan kriteria tingkat capaian kinerja adalah **TINGGI** Sementara untuk capaian kinerja out come dan out put dari tahun 2016 s.d 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut masing-masing telah mencapai 61,85% dan 109,39% dari yang semestinya 80% untuk tahun ke 4 RPJMD atau Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kriteria tingkat capaian kinerja 2016-2021 adalah **SANGAT TINGGI** Dan dari capaian tersebut total 27 kegiatan yang ada , jumlah kegiatan yang terlaksana berdasarkan target antara lain sesuai/tercapai 23 atau 95,83% yang melebihi target tidak ada sementara masih ada beberapa kegiatan yang di programkan dalam rencana kerja tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

Evaluasi Pelaksanaan Renja dapat di Lihat pada tabel berikut:

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

2.2.1. Indikator Kinerja Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengaju ke Renstra 2016-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL 2016	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
				2017	2018	2019	2020	2021	
	Tertib Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan sesuai SAP	Laporan Keuangan Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
		Status Laporan Kinerja	D	C	C	B	B	BB	BB
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Masyarakat yang berdaya	27%	42%	57%	71%	85%	100%	100%
		Persentase Usaha Ekonomi Desa	25%	37,2%	50,2%	56%	70%	100%	100%
		Persentase Masyarakat dalam Membangun Desa	0%	6%	25%	30%	40%	65%	65%
4	Meningkatnya Pengelolaan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pengelolaan Tata Kelola Desa	20%	30%	50%	60%	80%	100%	100%

2.2.2. Capaian Kinerja Indikator Sasaran

Pada tahun 2020, alokasi anggaran Belanja Langsung untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp. 4.706.801.000,- dengan pencapaian indikator sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2016	TARGET 2020	CAPAIAN 2020
1	Tertib Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan sesuai SAP	Laporan Keuangan Tepat waktu	Tepat/Tidak	Tepat	Tepat	Tepat
		Status Laporan Kinerja	A,B,C,D,E	D	B	B
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Masyarakat yang berdaya	Persen	27	85	85
		Persentase Usaha Ekonomi Desa	Persen	25	70	70
		Persentase Masyarakat dalam Membangun Desa	Persen	0	40	40
3	Meningkatnya Pengelolaan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pengelolaan Tata Kelola Desa	Persen	20	80	80

Melihat tabel sasaran dan indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik dimana proses laporan keuangan sudah sesuai dengan SAP, target dan capaian kinerja 2020 telah dilaksanakan dengan tepat.
- b. Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik dengan status laporan kinerja kategori BAIK dimana target dan capaian kinerja berpredikat B.
- c. Sasaran Strategis Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dengan Indikator sasaran 1. yaitu Persentase Lembaga Masyarakat yang berdaya dengan capaian 85 % didapatkan dari formulasi indikator yaitu jumlah LPM yang berdaya sebanyak 141 LPM dibagi Jumlah seluruh LPM yang ada yaitu 166 LPM,

sementara indikator sasaran 2. Adalah persentase Usaha Ekonomi Desa dengan capaian 70% didapatkan dari Formulasi Indikator yaitu Jumlah Usaha Ekonomi yang aktif sebanyak 116 Bumdes dibagi dengan jumlah Total Bumdes yang ada yaitu 166 Bumdes dan untuk indikator sasaran 3 yaitu Pesentase Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa dengan capaian sebesar 40 % didapatkan dari Formulasi Indikator yaitu Jumlah pelaksanaan Gotong royong/semalam didesa sebanyak 66 Desa

- d. Sasaran Strategis Meningkatkan Pengelolaan Pemerintah Desa dengan Indikator sasaran yaitu Persentase Peningkatan Pengelolaan tata kelola Desa sebanyak 80 % dengan formulasi indikator yaitu jumlah desa yang mengalami peningkatan tata kelola desa sebanyak 132 desa dibagi jumlah desa

2.2.3. Program dan Kegiatan 2021

1. Program Perencanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Pagu Anggaran Rp, 20.000.000,-
- b. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Pagu Anggaran Rp. 25.000.000,-
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Pagu Anggaran Rp. 300.000.000,-
- d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pagu Anggaran Rp. 40.000.000,-

2. Program Administrasi Keuangan

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pagu Anggaran Rp. 3.600.000.000,-
- b. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 50.000.000,-

3. Program Pelayanan Administrasi Umum

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pagu Anggaran Rp. 2.200.000,-
- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pagu Anggaran Rp. 400.000.000,-
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pagu Anggaran Rp. 12.000.000,-
- d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Pagu Anggaran Rp. 10.000.000,-
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor Pagu Anggaran Rp. 100.000.000,-

- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Pagu Anggaran Rp. 100.000.000,-
 - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Pagu Anggaran Rp. 15.000.000,-
 - h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pagu Anggaran Rp. 10.000.000,-
 - i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan Pagu Anggaran Rp. 17.200.000,-
 - j. Penyediaan Makanan dan Minuman Pagu Anggaran Rp. 50.000.000,-
 - k. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Pagu Anggaran Rp 500.000.000,-
 - l. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pagu Anggaran Rp. 600.000.000,-
 - m. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pagu Anggaran Rp. 65.000.000,-
 - n. Pengadaan Mebeleur Pagu Anggaran Rp. 65.000.000,-
 - o. Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor Pagu Anggaran Rp. 50.000.000,-
 - p. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pagu Anggaran Rp. 25.000.000,-
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur**
- a. Bimtek Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan pagu Anggaran Rp. 485.000.000,-
- 5. Program Penataan Desa**
- a. Fasilitasi Tata Wilayah Desa Pagu Anggaran Rp. 170.000.000
- 6. Program Peningkatan Kerjasama Desa**
- a. Fasilitasi Kerja sama antar Desa Pagu Anggaran Rp. 165.000.000,-
- 7. Program Administrasi Pemerintahan Desa**
- a. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Pagu Anggaran Rp. 170.000.000,-
 - b. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Pagu Anggaran Sebesar Rp.150.000.000,-
 - c. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Pagu Anggaran Rp. 450.000.000,-

- d. Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Pagu Anggaran Rp. 330.000.000,-
- e. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD Pagu Anggaran Rp. 880.000.000
- f. Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa Pagu Anggaran Rp. 220.000.000,-
- g. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pagu Anggaran Rp. 1.500.000.000,-
- h. Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pagu Anggaran Rp. 50.000.000,-
- i. Fasilitas Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa Pagu Anggaran Rp. 550.000.000,-
- j. Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa Pagu Anggaran Rp. 330.000.000

8. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat

- a. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Pagu Anggaran Rp. 150.000.000,-
- b. Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat Pagu anggaran sebesar Rp. 352.000.000,-
- c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pagu Anggaran sebesar Rp. 440.400.000,-
- d. Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Pagu Anggaran Sebesar Rp. 990.000.000,-
- e. Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Pagu Anggaran Sebesar Rp. 330.000.000,-

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Tugas Pokok

Berdasarkan PERDA Nomor 47 Tahun 2008 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Utara mempunyai Tugas pokok

dan Struktur Organisasi yang sangat Strategis Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu :

1. Perumusan Kebijakan Teknis Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Pemberian Dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kesekretariatan Dinas.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelayanan Dalam Bidang Pemerintahan Desa.
2. Pelayanan Dalam Bidang Kelembagaan Desa, termasuk Kelembagaan Masyarakat.
3. Pelayanan Dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta pelayanan Dalam Bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMD Kabupaten Luwu Utara tahun 2019, Berbagai isu – isu penting yang berkembang. Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berikut ini beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditinjau dari Tugas Pokok dan Fungsi, Berbagai isu – isu penting yang berkembang antara lain :

1. Kemiskinan dengan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Efektifitas Fungsi dan Kelembagaan Pemerintah Desa.
3. Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Tuntutan Demokratisasi Dalam Penyelenggaraan Pilkades.
Pemekaran Desa.
5. Sarana dan prasarana yang dimiliki yang ada masih sangat terbatas dalam mendukung pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien khususnya kendaraan operasional baik roda dua maupun roda empat khususnya untuk menjangkau daerah-daerah terisolir.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kabupaten Luwu Utara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran serta bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Rancangan awal RKPD akan dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan hasil analisis kebutuhan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat di Lihat pada tabel berikut :

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan dari masyarakat belum dimasukkan kedalam rencana kerja karena belum ada jadwal pelaksanaan musrenbang Kecamatan.

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021 KABUPATEN LUWU UTARA

NO	Program , kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang dibuat	2 Dokumen	
	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Program dan Kegiatan yang disusun	1 Dokumen	
		Dinas PMD	Jumlah Dokumen KUA dan KUA PPAS yang disusun	1 Dokumen	
		Dinas PMD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA yang disusun	2 Dokumen	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disinkronisasikan dengan pemangku kepentingan dengan stakeholder lainnya	1 Dokumen	
			Jumlah Musrembang Kecamatan yang dikunjungi	15 Kec	
			Jumlah ASN/Non ASN yg melaksanakan Kunker, reses, Monev dan Urusan lain kedinasan	30 Orang	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMD	Jumlah Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja yang dibuat	4 Triwulan	

	Administrasi Keuangan				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PMD	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	39 Orang	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PMD	Jumlah Dokumen yang tersusun	2 Dokumen	
	Administrasi Umum				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PMD	Jumlah surat yang terkirim	1500 Surat	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas PMD	Jumlah Staf Administrasi Teknis dan Non Teknis yang dibayarkan jasanya	30 Orang	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas PMD	Jumlah cleaning servis yang dibayarkan jasanya	1 orang	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dinas PMD	Jumlah Jenis Peralatan Kerja yang diperbaiki	12 Jenis	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas PMD	Jumlah ATK yang disediakan	1 tahun	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas PMD	Jumlah Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 tahun	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PMD	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	9 jenis	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas PMD	Jumlah Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 jenis	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas PMD	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang disediakan	18 jenis	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas PMD	Jumlah Volume Makanan dan Minuman yang disiapkan	12 kali	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar	Dinas PMD	Jumlah ASN/Non ASN yang melakukan Rapat2 dan Koordinasi Keluar Daerah	66 orang	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas PMD	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang diadakan	1 unit	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas PMD	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang diadakan	3 jenis	
	Pengadaan Mebeleur	Dinas PMD	Jumlah Jenis Mebeleur yang diadakan	3 jenis	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas PMD	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 gedung	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas PMD	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang di Pelihara	7 jenis	

	<p>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya</p> <p>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan</p> <p>PROGRAM PENATAAN DESA</p> <p>Penyelenggaraan Penataan Desa</p> <p>Fasilitasi Tata Wilayah Desa</p>	<p>Dinas PMD</p> <p>Dinas PMD</p>	<p>Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek/sosialisasi/workshop dan diklatpim</p> <p>Jumlah Desa yang difasilitasi tata wilayah Desanya</p>	<p>39 Orang</p> <p>166 desa</p>	
	<p>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</p> <p>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</p> <p>Fasilitasi Kerja sama Antar Desa</p>	<p>Dinas PMD</p> <p>Dinas PMD</p>	<p>Persentase Fasilitasi Kerjasama antar Desa</p> <p>Jumlah kerja sama antar Desa yang terbentuk</p> <p>Jumlah Pembinaan kerjasama antar Desa yang terbentuk</p>	<p>32 desa</p> <p>32 desa</p> <p>15 kali</p>	

<p>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</p> <p>Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</p> <p>Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</p> <p>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa</p> <p>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa</p> <p>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa</p> <p>Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD</p>	Dinas PMD	Jumlah Desa yang memiliki SOP dalam Pelayanan	166 desa
	Dinas PMD	Jumlah Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	166 desa
	Dinas PMD	Jumlah Perbub yang terkait Pemerintahan Desa	7 perbub
	Dinas PMD	Jumlah Kawasan Perdesaan	1 Kawasan
	Dinas PMD	Jumlah Aparat Desa yang mengikuti Pelatihan Aset dan Keuangan Desa	166 Desa
	Dinas PMD	Jumlah Pelaporan Keuangan Desa yang tepat waktu	166 Desa
	Dinas PMD	Jumlah Desa yang telah melaporkan Aset Desa	166 desa
	Dinas PMD	Jumlah Desa yang telah melaporkan Aset Desanya	166 desa
	Dinas PMD	Jumlah BPD yang melaksanakan tugas dan fungsinya	166 orang
			Jumlah pemilihan BPD

	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Dinas PMD	Jumlah BPD yang di bina	166 orang	
			Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrebang Desa	166 desa	
			Jumlah Desa yang akan membuat RKPDes	102 desa	
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Dinas PMD	Jumlah Desa yang akan melaksanakan Pilkades	102 desa	
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dinas PMD	Jumlah Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang dilaksanakan	166 desa	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa	Dinas PMD	Jumlah desa kurang berkembang	1 desa	
			Jumlah Desa berkembang	15 desa	
			Jumlah Desa cepat berkembang	140 desa	
			Desa mandiri	5 desa	
			Desa maju	25 desa	
			Desa berkembang	85 desa	
			Desa tertinggal	41 desa	
			Desa sangat tertinggal	10 desa	

	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa	Dinas PMD	Jumlah Desa yang mengimput data Profil Desa dengan baik	166 desa	
			Jumlah Desa yang melaksanakan Gotong Royong	166 desa	
			Jumlah Pencanaan BBGRM yang dilaksanakan	1 desa	
			Jumlah Kegiatan Semalam di Desa yang dilaksanakan	20 desa	
	<p>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat</p> <p>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tk. Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>				
	Identifikasi dan Infentarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMD	Jumlah Lembaga adat yang berfungsi	75 lembaga adat	
	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMD	Jumlah LPMD yang aktif	166 LPMD	
		Dinas PMD	Jumlah PKK yang aktif	189 lembaga adat	

		Dinas PMD	Jumlah PKK yang dibina	189 lembaga	
		Dinas PMD	Jumlah Posyandu Aktif	364 Posyandu	
		Dinas PMD	Jumlah Posyandu yang terintegrasi PAUD	30	
		Dinas PMD	Jumlah PAUD yang dibina	30	
		Dinas PMD	Jumlah KPSAMS	47	
	Peningkatan kapasitas kelembagaan	Dinas PMD	Jumlah LPMD yang dibina	166 orang	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Dinas PMD	Jumlah Lembaga Adat yang dibina	63 lembaga	
	Fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dinas PMD	Jumlah Bumdes yang dibina	166 Lembaga Ekonomi	
			Jumlah Bumdes yang dibina	25 Bumdes	
			Jumlah Posyantek yang dibentuk	15 Posyantek	
			Jumlah Posyantek yang dibina	15 Posyantek	

BAB. III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri dirumuskan sebagai berikut :

Visi

“ Terwujudnya Penyelenggaraan Pembangunan yang Desentralistik, Sistem Politik yang Demokratis, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Wadah Negara kesatuan Republik Indonesia”.

Misi

Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Upaya:

1. Memelihara dan Memanfaatkan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.
3. Memantapkan Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Desentralistik.
4. Memantapkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Auditable.
5. Memantapkan Sistem Politik dalam Negri yang Demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dalam Aspek Ekonomi, Sosial Budaya dan Politik.
7. Mengembangkan Keserasian Hubungan Pusat – Daerah antar Daerah dan antar Kawasan, Serta Kemandirian dalam Daerah.
8. Pengelolaan Pembangunan Serta Berkelanjutan dan Berbasis Kependudukan.

Kebijakan Nasional dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan menjadi dasar untuk mengadaptasi kebijakan pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut di

rumuskan program strategis untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Luwu Utara yaitu program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas Aparat Desa dan kelembagaan Desa.

Program tersebut diatas kemudian diharmonisasi dengan program pemberdayaan Propinsi Sulawesi Selatan, melalui sinkronisasi program. Hal ini dimaksudkan dengan percepatan dan penanggulangan kemiskinan sejalan dengan program propinsi masih mencakup hal kebijakan Nasional.

Dalam rangka mencapai visi dan misi maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan strategis.

3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan menfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara :

1. Tujuan Sasaran untuk Mewujudkan Misi Kesatu

Meningkatkan Kompetensi Aparat Dinas PMD, Aparat Desa, Maka tujuan dan sasaran pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tujuan :

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparat desa dalam bidang pemerintahan desa.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas SDM Aparat Dinas PMD.
 2. Meningkatnya kemampuan aparat desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 60 % menjadi 80%.
 3. Meningkatnya kualitas pelayanan aparat desa 60 % menjadi 80%.
- 2) Meningkatkan skill aparat desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan.

Sasaran :

1. Meningkatnya jumlah aparat desa yang memiliki skill/kemampuan mengoperasikan komputer dari 80 % menjadi 100%.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan aparat desa dalam penyelenggaraan administrasi 80 % menjadi 100%.
- 3) Meningkatkan disiplin dan budaya kerja aparat desa.
Sasaran :
 1. Meningkatnya disiplin aparat desa dalam melaksanakan tugas dari 80 % menjadi 100%.
 2. Meningkatnya etos kerja dan produktifitas aparat desa 80 % menjadi 100%.

2. Tujuan Sasaran untuk Mewujudkan Misi Kedua

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa, Maka tujuan dan sasaran pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tujuan :

- 1) Meningkatkan Efektifitas Fungsi dan Peran lembaga ketahanan Masyarakat desa (LKMD).

Sasaran :

1. Meningkatnya Efektifitas Fungsi dan Peran LKMD dari 80 % menjadi 100%.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan melalui wadah LKMD dari 80 % menjadi 100%.
- 2) Meningkatkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai peraturan perundang-undangan.

Sasaran :

1. Meningkatnya Fungsi BPD sesuai dengan PP 72 Tahun 2005 dan Perda No. 8 Tahun 2007 dari 70% menjadi 100%.
2. Meningkatnya Koordinasi dan Harmonisasi antara BPD dengan kepala desa dari 80% menjadi 100%.
- 3) Meningkatkan Pengetahuan serta wawasan anggota LKMD dan BPD sesuai tugas Pokok dan fungsinya.

Sasaran :

1. Meningkatnya Pengetahuan serta Wawasan Anggota LKMD dan BPD yang memiliki pengetahuan dan wawasan dalam bidang tugasnya dari 60% menjadi 100%.

3. Tujuan Sasaran untuk Mewujudkan Misi Ketiga.

Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan, Maka tujuan dan sasaran pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tujuan :

- 1) Meningkatkan daya beli masyarakat serta menurunnya jumlah keluarga miskin.

Sasaran :

1. Meningkatnya jumlah masyarakat di pedesaan yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dari 80% menjadi 100%.
2. teridentifikasinya penurunan prosentase jumlah keluarga miskin dari 30 % menjadi 100%.

- 2) Bertambahnya jumlah Rumah tangga yang memiliki Usaha Ekonomi Industri rumah tangga.

Sasaran :

1. Meningkatnya jumlah keluarga yang dapat mengembangkan usaha/industri Rumah Tangga dari 20% menjadi 100%.

4. Tujuan Sasaran untuk Mewujudkan Misi Keempat

Pendayagunaan Potensi Desa Melalui Pengembangan Desa. Maka tujuan dan sasaran pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tujuan :

- 1) Menyediakan data potensi desa yang akurat dalam perencanaan pembangunan desa.

Sasaran :

1. Meningkatnya jumlah desa yang memiliki data potensi yang akurat dari 50% menjadi 100%.

2. Tersusunnya Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa) berdasarkan data potensi yang akurat dari 40% menjadi 100%.
- 2) Menyediakan data potensi desa untuk mengukur tingkat perkembangan desa.

Sasaran :

2. Meningkatnya jumlah desa yang mencapai tingkat perkembangan dari Kurang Berkembang, Lamban Berkembang, Berkembang dan Cepat Berkembang dari 30% menjadi 50%.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun Program kerja operasional sebagai implimentasi kebijakan yang ditetapkan. Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

a. Program

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang. Kantor
 5. Penyediaan Bahan Bancaan dan Peraturan Perundang-undangan
 6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
 7. Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Aset Daerah.
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 3. Pengadaan Mebeleur
 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas/Operasional
 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 7. Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor

- c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 1. Bimtek Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- d. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- e. Peningkatan Pelayanan Kedinasan
 - 1. Kunjungan Kerja Bersama Bupati/WakilBupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah Tingkat Atas /Unit Kerja Terkait
- f. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - 1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
 - 2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
- g. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
 - 1. Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan
 - 2. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
- h. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
 - 1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
 - 2. Pelaksanaan Musyarakat Pembangunan Desa
 - 3. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
- i. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - 1. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
 - 2. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
 - 3. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
- j. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
 - 1. Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif
- k. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - 1. Fasilitasi Kerjasama antar Desa
 - a. Fasilitasi Kerjasama antar Desa

BAB IV

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini disusun sebagai acuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan sebagai implementasi untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Luwu Utara.

Rencana Kerja tahunan (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara merupakan dokumen perencanaan yang didasarkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016-2021. Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan yang memuat tentang Program dan kegiatan 1 (satu) tahun kedepan sebagai dasar untuk menyusun RKA, serta sebagai alat pengukuran kinerja pada akhir tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.

Semoga Rencana Kerja ini dapat memberikan manfaat dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Masamba, Mei 2020

KEPALA DINAS,

Drs. MISBAH

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19670405 199710 1 001

TABEL 5

**RUMUSAN RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN LUWU UTARA**

SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				CATATAN PENTING	Prakiraan Rencana Tahun 2022		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	13	01				Program Penunjang Urusan Pemerintah	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Luwu Utara	75	%	6,611,400,000			7,603,110,000	
2	13	01	2.01			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dkokumen Perencanaan yang disusun dan disinkronisasikan	DPMD	100	%	385,000,000	APBD	0	-	442,750,000
2	13	01	2.01	01		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang dibuat	DPMD	2	Dokumen	20,000,000	APBD	0	-	0
2	13	01	2.01	02		Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Program dan Kegiatan yang disusun	DPMD	1	Dokumen	25,000,000	APBD	0	-	0
							Jumlah Dokumen KUA dan KUA PPAS yang disusun	DPMD	1	Dokumen					
							Jumlah Dokumen RKA dan DPA yang disusun	DPMD	2	Dokumen					
2	13	01	2.01	04		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disinkronisasikan dengan pemangku kepentingan dengan stekholder lainnya	DPMD	1	Dokumen	300,000,000	APBD	0	-	0

								Jumlah Musrembang Kecamatan yang dikunjungi	DPMD	15	Kecamatan				0	-	
								Jumlah ASN/Non ASN yg melaksanakan Kunker, reses, Monev dan Urusan lain kedinasan	DPMD	30	Orang				0	-	
2	13	01	2.01	05			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja yang dibuat	DPMD	4	Triwulan	40,000,000			0	-	0
2	13	01	2.02				Administrasi Keuangan	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan		100	%	3,650,000,000					4,197,500,000
2	13	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	DPMD	39	Orang	3,600,000,000	APBD		0	-	0
2	13	01	2.02	06			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun	DPMD	2	Dokumen	50,000,000	APBD		0	-	0
2	13	01	2.03				Administrasi Umum	Persentase Peningkatan Administrasi Umum		100	%	2,091,400,000					2,405,110,000
2	13	01	2.03	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terkirim	DPMD	1500	Surat	2,200,000	APBD		0	-	0
2	13	01	2.03	07			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Staf Administrasi Teknis dan Non Teknis yang dibayarkan jasanya	DPMD	30	Orang	400,000,000	APBD		0	-	0
2	13	01	2.03	08			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Cleaning servis yang dibayarkan jasanya	DPMD	1	Orang	12,000,000	APBD		0	-	0
2	13	01	2.03	09			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jenis Peralatan kerja yang diperbaiki	DPMD	12	Jenis	10,000,000	APBD		0	-	0
2	13	01	2.03	10			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Atk yang dfisediakan	DPMD	1	Tahun	100,000,000	APBD		0	-	0

2	13	01	2.03	11			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan yang disediakan	DPMD	1	Tahun	100,000,000	APBD		0	-	0
2	13	01	2.03	12			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	DPMD	9	Jenis	15,000,000	APBD		0	-	0
2	13	01	2.03	13			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	DPMD	7	Jenis	10,000,000	APBD		0	-	0
2	13	01	2.03	15			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang disediakan	DPMD	18	Jenis	17,200,000	APBD		0	-	0
2	13	01	2.03	16			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Volume Makanan dan Minuman yang disiapkan	DPMD	12	kali	50,000,000	APBD		0	-	0
2	13	01	2.03	18			Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar	Jumlah ASN/Non ASN yang melakukan Rapat2 dan Koordinasi Keluar Daerah	DPMD	66	Orang	500,000,000	APBD		0	-	0
2	13	01	2.03	20			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang diadakan	DPMD	1	Unit	600,000,000	APBD		0	-	0
2	13	01	2.03	24			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang diadakan	DPMD	3	Jenis	100,000,000	APBD		0	-	0
2	13	01	2.03	25			Pengadaan Mebeleur	Jumlah Jenis Mebeleur yang diadakan	DPMD	3	Jenis	100,000,000	APBD		0	-	0
2	13	01	2.03	28			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	DPMD	1	Gedung	50,000,000	APBD		0	-	0
2	13	01	2.03	34			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang di Pelihara	DPMD	7	Jenis	25,000,000	APBD		0	-	0
2	13	01	2.04				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Persentase Peningkatan dan Kapasitas Sumber Daya	DPMD	100	%	485,000,000	APBD		0	-	557,750,000

2	13	01	2.04	11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek/sosialisasi/workshop dan diklatpim	DPMD	39	Orang	485,000,000	APBD		0	-	0
2	13	02					PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar	Kab.Luwu Utara	100	%	170,000,000	APBD		0	-	195,500,000
								PERSENTASE APARAT DESA YANG TELAH DILATIH		100							
								PERSENTASE PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA		100							
								PERSENTASE MANAJEMAN PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK		80							
								PERSENTASE BPD YANG DIBINA		70							
2	13	02	2	01			Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab.Luwu Utara	100	%	170,000,000	APBD		0	-	0
2	13	02	2	01	02		Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Peta desa berbasis GIS	Kab. Luwu Utara	166	Desa	170,000,000	APBD		0	-	0
2	13	02	2	01	02		Penyediaan Prasarana dan Sarana Transportasi antar Wilayah	Jumlah Prasarana dan Sarana Transportasi antar Wilayah yang tersedia	Kab. Luwu Utara	6	Jenis		APBD		0		-
2	13	03					PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Kerjasama antar Desa yang terbentuk	Kab. Luwu Utara	26	%	165,000,000	APBD		0	-	189,750,000

2	13	03	2	01			Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Kab.Luwu Utara	32	Desa	165,000,000	APBD		0	-	0
2	13	03	2	01	01		Fasilitasi Kerja sama Antar Desa	Jumlah kerja sama antar Desa yang terbentuk	Kab.Luwu Utara	32	Desa	165,000,000	APBD		0	-	0
								Jumlah Pembinaan kerjasama antar Desa yang terbentuk	Kab.Luwu Utara	15	kali		APBD		0	-	
2	13	04					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar	Kab.Luwu Utara	100	%	4,630,000,000	APBD		0	-	5,324,500,000
								PERSENTASE APARAT DESA YANG TELAH DILATIH		100	%						0
								PERSENTASE PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA		100	%						0
								PERSENTASE MANAJEMAN PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK		80	%						0
								PERSENTASE BPD YANG DIBINA		70	%						0
2	13	04	2	01			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pengawasan Administrasi Pemerintahan	Kab.Luwu Utara	100	%	4,630,000,000	APBD		0	-	0
2	13	04	2	01	01		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	JUMLAH DESA YANG MENGIKUTI PELATIHAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA	Kab.Luwu Utara	166	Desa	170,000,000	APBD		0	-	0

								JUMLAH PEMBINAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA	Kab.Luwu Utara	166	Desa				0	-	0
								JUMLAH DESA YANG MEMILIKI SOP DALAM PELAYANAN	Kab.Luwu Utara	166	Desa						
2	13	04	2	01	02			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab.Luwu Utara	7	Perbub	150,000,000	APBD		0	-	0
2	13	04	2	01	03			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab.Luwu Utara	1	kawasan	450,000,000	APBD		0	-	0
2	13	04	2	01	04			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Kab.Luwu Utara	166	desa	330,000,000	APBD		0	-	0
								JUMLAH PELAPORAN KEUANGAN DESA YANG TEPAT WAKTU	Kab.Luwu Utara	166	desa				0	-	0
								JUMLAH DESA YANG TELAH MELAPORKAN ASET DESA	Kab.Luwu Utara	166	desa				0	-	0
2	13	04	2	01	05			Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	Kab.Luwu Utara	166	Orang	880,000,000	APBD		0	-	0
								JUMLAH PEMILIHAN BPD	Kab.Luwu Utara	0	orang				0	-	
								JUMLAH BPD YANG DIBINA	Kab.Luwu Utara	166	orang				0	-	

2	13	04	2	01	06		Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrembang Des	Kab.Luwu Utara	166	Desa	220,000,000	APBD		0	-	0
								Jumlah Desa yang akan membuat RKPDes	Kab.Luwu Utara	102	Desa				0	-	
2	13	04	2	01	09		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang Akan melaksanakan Pilkades	Kab.Luwu Utara	102	Desa	1,500,000,000	APBD		0	-	-
2	13	04	2	01	10		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang dilaksanakan	Kab.Luwu Utara	166	Desa	50,000,000	APBD		0	-	0
2	13	04	2	01	11		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa	Jumlah desa kurang berkembang	Kab.Luwu Utara	1	Desa	550,000,000	APBD		0	-	0
								Jumlah desa berkembang	Kab.Luwu Utara	15	Desa				0	-	
								Jumlah desa cepat berkembang	Kab.Luwu Utara	140	Desa				0	-	
								DESA MANDIRI	Kab.Luwu Utara	5	Desa				0	-	
								DESA MAJU	Kab.Luwu Utara	25	Desa				0	-	
								DESA BERKEMBANG	Kab.Luwu Utara	85	Desa				0	-	
								DESA TERTINGGAL	Kab.Luwu Utara	41	Desa				0	-	

								DESA SANGAT TERTINGGAL	Kab.Luwu Utara	10	Desa				0	-	
								JUMLAH DESA YANG MENGINPUT PROFIL DESA DENGAN BAIK	Kab.Luwu Utara	166	Desa				0	-	
2	13	04	2	01	12			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa	Kab.Luwu Utara	166	Desa	330,000,000	APBD		0	-	0
								Jumlah Pencanangan BBGRM yang dilaksanakan	Kab.Luwu Utara	1	Desa				0	-	
								Jumlah Kegiatan Semalam di desa yang dilaksanakan	Kab.Luwu Utara	20	Desa				0	-	
2	13	05						PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab.Luwu Utara	100	%	2,262,000,000					2,601,300,000
								PERSENTASE LPMD		100							0
								PORSENTASE LEMBAGA ADAT AKTIF (Cashcading)		100							
								PORSENTASE POSYANDU aktif (Cashcading)		100							

2	13	05	2	01	01		Identifikasi dan Infentarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga adat yang berfungsi	Kab. Luwu Utara	75	Lembaga adat	150,000,000	APBD		0	-	0
2	13	05	2	01	02		Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah LPMD yang aktif	Kab. Luwu Utara	166	LPMD	352,000,000	APBD		0	-	0
								Jumlah PKK aktif	Kab. Luwu Utara	189	Lembaga adat				0	-	0
								Jumlah PKK yang dibina	Kab. Luwu Utara	189	Lembaga				0	-	0
								Jumlah Posyandu Aktif	Kab. Luwu Utara	364	Posyandu				0	-	0
								Jumlah Posyandu yang terintegrasi PAUD		30					0		0
								Jumlah PAUD yang dibina		30					0		0
								Jumlah KPSPAMS		47					0		0
2	13	05	2	01	03		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah LPMD yang dibina	Kab. Luwu Utara	166	Orang	440,000,000	APBD		0	-	0
								Jumlah Lembaga Adat yang dibina	Kab. Luwu Utara	63	Lembaga				0	-	
2	13	05	2	01	06		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Bumdes yang dibina	Kab. Luwu Utara	166	Lembaga Ekonomi	990,000,000	APBD		0	-	0

								Jumlah pasar Desa yang dibina	Kab. Luwu Utara	25	Bumdes				0	-			
2	13	05	2	01	07			Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Luwu Utara	15	Posyantek	330,000,000	APBD		0	-	0		
								Jumlah Posyantek yang di bina	Kab. Luwu Utara	15	Posyantek				0	-	0		
JUMLAH																		15,914,160,000	
												13,838,400,000							

Masamba, 13 Maret 2020

KEPALA DINAS,

W. Drs. MISBAH

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19670405 199710 1 001

LAMPIRAN SURAT NOMOR :

TANGGAL :

HASIL PENYESUAIAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	RENJA OPD			KUA/PPAS			KETERANGAN	
	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019	INDIKATOR	ANGGARAN	KEPMENDAGRI 50-3708 TAHUN 2020	INDIKATOR	ANGGARAN		
A		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	6,559,400,000	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	4,942,635,400	
	1	PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun dan disinkronisasikan	345,000,000	1.PERENCANAAN,PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINEJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun dan disinkronisasikan	504,397,800	
	1.1.	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	20,000,000	1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	459,397,800	
	1.2.	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen rencana akasi Program dan Kegiatan yang disusun	25,000,000		Jumlah Dokumen rencana akasi Program dan Kegiatan yang disusun		
			Jumlah Dokumen KUA PPAS yang disusun			Jumlah Dokumen KUA PPAS yang disusun		
			Jumlah Dokumen RKA dan DPA yang disusun			Jumlah Dokumen RKA dan DPA yang disusun		
	1.4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Musrembang Kecamatan yang dikunjungi	300,000,000		Jumlah Musrembang Kecamatan yang dikunjungi		
			Jumlah Kunker,Reses,Monev dan Urusan lain kedinasan yang dilaksanakan			Jumlah Kunker,Reses,Monev dan Urusan lain kedinasan yang dilaksanakan	-	
	1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja yang dibuat	40,000,000	1.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja yang dibuat	45,000,000	
	2.	ADMINISTRASI KEUANGAN	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan	3,650,000,000	5.ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan	3,337,003,000	
	2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	3,600,000,000	5.1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	3,337,003,000	

					1.PERENCANAAN,PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINEJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun dan disinkronisasikan	50,000,000	
	2.6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP,LPPD DAN RFK yang tersusun	50,000,000	1.6.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP,LPPD DAN RFK yang tersusun	50,000,000	
	3.	ADMINISTRASI UMUM	Persentase peningkatan Administrasi Umum	2,079,400,000	8.PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA		416,850,000	
	3.1.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang terkirim	2,200,000	8.1.Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terkirim	2,050,000	
	3.7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Staf Administrasi Teknis dan Non Teknis yang dibayarkan jasanya	400,000,000	8.4.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Staf Administrasi Teknis dan Non Teknis yang dibayarkan jasanya	414,800,000	
	3.8	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Jumlah Cleaning servis yang dibayarkan jasanya	12,000,000		Jumlah Cleaning servis yang dibayarkan jasanya		
						Jumlah Tenaga Supir yang dibayarkan		
					6. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		411,322,600	
	3.9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jenis Peralatan kerja yang diperbaiki	10,000,000	-			
	3.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Atk yang disediakan	100,000,000	6.4.Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Atk yang disediakan	100,000,000	
						Jumlah Volume Makanan dan Minuman yang disiapkan		
	3.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggadaan yang disediakan	100,000,000	6.1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	14,999,600	
	3.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	15,000,000	6.5.Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggadaan yang disediakan	30,000,000	
	3.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10,000,000	-	-		

B	2	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang melaksanakan tata kelola Pemerintahan yang baik dan benar	170,000,000	2.13.04.PROGRAM ADMINISTRASI PEMRINTAHAN DESA	Persentase Desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar	20,000,000	
	02.2.01	PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA	Persentase penyelenggaraan Penataan Desa	170,000,000	2.13.04.2.01.Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pengawasan Administrasi Pemerintahan	20,000,000	
	2.2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Peta Desa Berbasis GIS	170,000,000	2.13.04.2.01.15.Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Peta Desa Berbasis GIS	20,000,000	
	2.5	Penyediaan Prasarana dan Sarana Transportasi antar wilayah	Jumlah Sarana dan Prasarana Transportasi antar wilayah yang tersedia	-			-	
C	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	PERSENTASE KERJASAMA ANTAR DESA YANG TERBENTUK	165,000,000	2.13.03.PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	PERSENTASE KERJASAMA ANTAR DESA YANG TERBENTUK	49,968,000	
	03.2.01.	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama antar desa	165,000,000	13.03.01.Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama antar desa	49,968,000	
	3.1	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Jumlah kerjasama antar desa yang terbentuk		13.03.01.2.01.01. Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar desa yang terbentuk	49,968,000	
D	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar	4,682,000,000	2.13.04.PROGRAM ADMINISTRASI PEMRINTAHAN DESA	Persentase Desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar	56,261,500	
	04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Persentase Pengawasan Administrasi Pemerintahan	4,682,000,000	2.13.04.2.01.Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pengawasan Administrasi Pemerintahan	56,261,500	
	4.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa	170,000,000	2.13.04.2.01.01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa	56,261,500	
			Jumlah Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa			Jumlah Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa		
			Jumlah Desa yang memiliki SOP dalam pelayanan			Jumlah Desa yang memiliki SOP dalam pelayanan		
	4.2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Perbub yang terkait Pemerintahan Desa	150,000,000	2.13.04.2.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Perbub yang terkait Pemerintahan Desa	-	
					2.13.03.PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	PERSENTASE KERJASAMA ANTAR DESA YANG TERBENTUK	46,829,000	

					13.03.01.Fasilitas Kerjasama antar Desa	Persentase Fasilitas Kerjasama antar desa	46,829,000	
	4.3	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Kawasan yang dibina dan dikembangkan potensinya	450,000,000	13.03.01.2.01.02. Fasilitas Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah Kawasan yang dibina dan dikembangkan potensinya	46,829,000	
			Jumlah Dokumen Potensi Pembangunan Kawasan Perdesaan			Jumlah Dokumen Potensi Pembangunan Kawasan Perdesaan		
					2.13.04.PROGRAM ADMINISTRASI PEMRINTAHAN DESA	Persentase Desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar	8,451,126,220	
					2.13.04.2.01.Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pengawasan Administrasi Pemerintahan	8,451,126,220	
	4.4	Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan Keuangan Desa	330,000,000	2.13.04.2.01.04 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan Keuangan Desa	4,755,453,120	
			Jumlah pelaporan keuangan desa yang tepat waktu			Jumlah pelaporan keuangan desa yang tepat waktu		
			Jumlah desa yang telah melaporkan aset desa		2.13.04.2.01.04 Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang telah melaporkan aset desa	20,000,000	
	4.5	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	Jumlah Aparat Desa yang mengikuti Pelatihan Aset dan Keuangan Desa	880,000,000	2.13.04.2.01.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa	Jumlah Aparat Desa yang mengikuti Pelatihan Aset dan Keuangan Desa	257,676,100	
			Jumlah Aparat Desa yang mengikuti Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa			Jumlah Aparat Desa yang mengikuti Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa		
			Jumlah Pengurus BPD yang mengikuti Penguatan Kapasitas BPD		2.13.04.2.01.14.Fasilitas Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Pengurus BPD yang mengikuti Penguatan Kapasitas BPD	30,000,000	
	4.6	Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah desa yang melaksanakan Musrenbang Desa	220,000,000	2.13.04.2.01.06 Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah desa yang melaksanakan Musrenbang Desa	80,000,000	
			Jumlah Desa yang akan membuat RPJMDes dan RKPDes			Jumlah Desa yang akan membuat RPJMDes dan RKPDes		
	4.9	Penyelenggaran Pemilihan, Pengangkatan dan	Jumlah Desa yang akan melaksanakan Pilkades	1,500,000,000	2.13.04.2.01.09Penyelenggaraan Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian	Jumlah Desa yang akan melaksanakan Pilkades	3,140,747,000	

		Pemberhentian Kepala Desa			Kepala Desa			
			Jumlah Kepala Desa yang akan dilantik			Jumlah Kepala Desa yang akan dilantik		
	4.1	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dilaksanakan	102,000,000	2.13.04.2.01.10 Fasilitasi, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dilaksanakan	-	
	4.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa	Jumlah Desa yang menginput Profil Desa dengan baik	550,000,000	2.13.04.2.01.11. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa yang menginput Profil Desa dengan baik	59,599,000	
			Jumlah Operator Profil Desa yang dilatih			Jumlah Operator Profil Desa yang dilatih		
			Jumlah desa kurang berkembang		2.13.04.2.01.18. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa kurang berkembang	107,651,000	
			Jumlah desa berkembang			Jumlah desa berkembang		
			Jumlah desa cepat berkembang			Jumlah desa cepat berkembang		
			Desa Mandiri			Desa Mandiri		
			Desa Maju			Desa Maju		
			Desa Berkembang			Desa Berkembang		
			Desa Tertinggal			Desa Tertinggal		
			Desa sangat tertinggal			Desa sangat tertinggal		
			Desa Tertinggal			Desa Tertinggal		
					5. Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat		83,409,000	
					5.2.01. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat TK. Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat pelakunya Hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota		83,409,000	
	4.12	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Gotong Royong	330,000,000	5.2.01.07. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	Jumlah Desa yang melaksanakan Gotong Royong	83,409,000	
			Jumlah Pencanaan BBGRM yang dilaksanakan			Jumlah Pencanaan BBGRM yang dilaksanakan		

			Jumlah kegiatan semalam di desa yang dilaksanakan			Jumlah kegiatan semalam di desa yang dilaksanakan		
E	5	Pogram Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat		2,262,000,000	2.13.05.Pogram Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat		634,066,000	
	05.2.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat TK. Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat pelakunya Hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga adat dan hukum adat serta kelembagaan masyarakat desa yang berperan pembangunan desa	2,262,000,000	2.13.05.2.01Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat TK. Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat pelakunya Hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga adat dan hukum adat serta kelembagaan masyarakat desa yang berperan pembangunan desa	634,066,000	
	5.1	Identifikasi dan Infentarisasi Masayarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga adat yang berfungsi	150,000,000	2.13.05.2.01.01Identifikasi dan Infentarisasi Masayarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga adat yang berfungsi	10,000,000	
	5.2	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah LPMD yang aktif	352,000,000	2.13.05.2.01.02.Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna),Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat	Jumlah LPMD yang aktif	38,420,000	
			Jumlah PKK Aktif			Jumlah Posyandu Aktif		
			Jumlah PKK yang dibina			Jumlah posyandu yang terintegrasi PAUD		
			Jumlah Posyandu Aktif			Jumlah PAUD yang dibina		
			Jumlah posyandu yang terintegrasi PAUD			Jumlah KPSPAMS		
			Jumlah PAUD yang dibina		2.13.05.2.01.09.Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK Aktif	90,000,000	
			Jumlah KPSPAMS			Jumlah PKK yang dibina		
	5.3	Peningkatan kapasitas kelembagaan	Jumlah LPMD yang dibina	440,000,000	2.13.05.2.01.03.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna),Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat	Jumlah LPMD yang dibina	57,892,000	
			Jumlah Lembaga Adat yang dibina			Jumlah Lembaga Adat yang dibina		
			Jumlah KPMD yang dilatih			Jumlah KPMD yang dilatih		

	5.5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan	Jumlah Pengadaan Saprasi Kelembagaan yang disediakan		2.13.05.2.01.04.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna),Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat	Jumlah Pengadaan Saprasi Kelembagaan yang disediakan	25,000,000	
	5.6	Fasilitasi Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Bumdes yang dibina	990,000,000	2.13.05.2.01.05.Fasilitasi Lembaga Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Bumdes yang dibina	351,754,000	
			Jumlah pasar desa yang dibina			Jumlah pasar desa yang dibina		
	5.7	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Posyantek yang dibentuk	330,000,000	2.13.05.2.01.06.Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Posyantek yang dibentuk	61,000,000	
			Jumlah Posyantek yang dibina			Jumlah Posyantek yang dibina		
	JUMLAH			13,838,400,000	JUMLAH		14,284,295,120	

MASAMBA, 15 November 2020

KEPALA DINAS,

Drs. MISBAH

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19670405 199710 1 001